

OPTIMALISASI KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sartono^{1*}, Indah Cahyani²

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Halu Oleo, Kendari.

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pattimura, Ambon.

email: sartonos1969@gmail.com

Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan koordinasi dan komunikasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan informan dari BAPPEDA dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik, baik secara internal (vertikal, horizontal, diagonal) maupun eksternal. Komunikasi publik yang dilakukan BAPPEDA juga cukup efektif, dengan adanya mitra di setiap OPD dalam lingkup provinsi. Beberapa aspek komunikasi yang terlihat adalah: 1) Transmisi komunikasi menggunakan WhatsApp untuk diskusi dan pertukaran data; 2) Konsistensi dalam komunikasi rutin antara BAPPEDA dan OPD untuk memastikan keselarasan pesan; 3) Kejelasan pesan yang disampaikan BAPPEDA kepada OPD jelas dan sesuai kebutuhan. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam komunikasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif.

Kata kunci : Komunikasi Publik, Perencanaan Pembangunan Daerah, Transmisi Komunikasi, Konsistensi, Kejelasan Pesan.

ABSTRACT

This study examines the implementation of coordination and public communication in regional development planning at BAPPEDA Southeast Sulawesi Province. The research uses a qualitative descriptive analysis method with informants from BAPPEDA and Southeast Sulawesi Province's Department of Energy and Mineral Resources (ESDM). The findings indicate that coordination in development planning has been effectively implemented, both internally (vertical, horizontal, diagonal) and externally. Public communication conducted by BAPPEDA is also quite effective, with partnerships established with each OPD within the province. Several aspects of communication observed include: 1) Communication transmission using WhatsApp for discussions and data exchange; 2) Consistency in regular communication between BAPPEDA and OPDs to ensure message alignment; 3) Clarity of messages conveyed by BAPPEDA to OPDs, which are clear and aligned with needs. This study highlights the importance of consistency and clarity in communication to support more effective regional development planning

Keywords : Public Communication, Regional Development Planning, Communication Transmission, Consistency, Clarity of Message.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan, dengan kewenangan yang signifikan dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan publik. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan ketenteraman bagi masyarakat (Soares et al., 2015). Pembangunan yang holistik dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Indah et al., 2024). Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan daya tarik kawasan serta memperkuat daya saing ekonomi (Anouar et al., 2024). Pentingnya pembangunan yang terorganisir dapat dianggap sebagai indikator utama untuk mengukur kemajuan dan rencana pembangunan suatu negara atau wilayah. Perencanaan pembangunan merupakan tahap dimana pilihan dan keputusan dibuat berdasarkan informasi dan fakta, yang kemudian menjadi dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial, baik yang bersifat materi (fisik) maupun non-materi (mental dan spiritual) guna mencapai orientasi yang lebih optimal. Proses perencanaan memiliki peran krusial dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya, dan dimensi serta kegiatan perencanaan menjadi strategi dan dasar untuk mencapai tujuan ketika merumuskan strategi realisasi pengembangan. Sebagian besar klaim negara terhadap pembangunan regional sebenarnya merupakan hasil dari kebijakan dan tujuan lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan perencanaan regional yang dirancang secara sengaja (Ibrahim, 2017). Evaluasi pembangunan daerah perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembangunan telah tercapai serta memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan (Nasution et al., 2025).

Kesuksesan implementasi pembangunan sangat bergantung pada penentuan sasaran dengan efisien memanfaatkan potensi yang ada. Untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai harapan, koordinasi dan komunikasi publik dari pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan menjadi aspek yang perlu ditekankan. Koordinasi dan komunikasi publik sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda. Koordinasi menjamin seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dengan baik dalam rencana tersebut. Sementara itu, komunikasi publik memastikan bahwa informasi yang jelas dan akurat tentang rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Komunikasi merupakan

kebutuhan dasar manusia dalam berinteraksi dengan sesama, baik untuk mempengaruhi orang lain, mengekspresikan diri, maupun memahami dunia di sekitar mereka (Hanani, 2017).

Koordinasi melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga non-pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan rencana pembangunan, sementara masyarakat, swasta, dan lembaga non-pemerintah memberikan masukan dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek pembangunan. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, diperlukan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait. Komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah sering mendapat sorotan karena terkesan kurang terencana dengan baik. Baik dari sisi siapa yang menyampaikan pesan maupun isi komunikasi yang disampaikan, sering kali terlihat kurang terkoordinasi (Mucharam, 2022).

Pengelolaan komunikasi publik oleh pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi masyarakat, serta mempercepat penyampaian informasi terkait kebijakan dan program pemerintah (Ramadani, 2019a). Komunikasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan rencana pembangunan, serta memberikan masukan yang konstruktif. Informasi yang jelas dan akurat tentang proyek pembangunan harus disampaikan terus terang atau tidak disembunyikan kepada warga. Ini bisa dilakukan melalui media massa, pertemuan publik, dan platform daring. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan perspektif mereka tentang rencana pembangunan. Pemerintah perlu menerapkan manajemen komunikasi yang baik untuk memastikan pengelolaan pengaduan masyarakat berjalan efektif (Demaisi et al., 2024). Komunikasi yang efektif dapat tercapai ketika penyebar pesan dan penerima pesan memiliki pemahaman yang sama terhadap isi pesan yang disampaikan (Varanida, 2023).

Selain itu, komunikasi publik juga dapat membantu memperkuat keikutsertaan warga dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam konteks pemerintah dapat mengadakan konsultasi publik dan mengikutsertakan warga pada penentuan tentang proyek pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat diakomodasi dalam rencana pembangunan dan dapat meningkatkan dukungan masyarakat untuk proyek pembangunan tersebut. Penelitian terdahulu telah mengkaji dampak masing-

masing faktor, seperti transparansi komunikasi digital, kepercayaan publik, dan keterlibatan publik, terhadap hasil komunikasi krisis (Kumalasari et al., 2024). Penelitian (Aryal et al., 2024) menjelaskan bahwa dengan mengadopsi pendekatan alternatif yang mengutamakan empati, pengambilan keputusan secara partisipatif, dan keterlibatan yang responsif, pemerintah dapat memperbaiki komunikasi publik serta mengurangi kesenjangan kepercayaan.

Dalam keseluruhan, koordinasi dan komunikasi publik sangat penting dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa semua pihak-pihak yang berkepentingan terlibat dalam tahap perencanaan dan bahwa informasi yang jelas dan akurat tentang rencana pembangunan disampaikan dengan terus terang pada warga. Hal ini dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan dukungan untuk proyek pembangunan. Ini menjadi tugas dari BAPPEDA termasuk BAPPEDA Prov. Sultra yang sedang gencar melakukan pembangunan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Melihat pada UU 23/2014 tentang Pemda, dimaksudkan Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan peran dan fungsi perencanaan. Sebagai bagian integral dari pelaksanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, BAPPEDA bertugas mendukung Gubernur dalam pelaksanaan kewenangan terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya. BAPPEDA secara khusus diberi tanggung jawab dalam penyusunan dan implementasi kebijakan daerah di sektor perencanaan pembangunan daerah, serta menjalankan tiga fungsi pokok, yakni merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, dan memberikan bimbingan serta melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berpijak pada peninjauan di kantor Bappeda Prov. Sultra, lemahnya koordinasi perencanaan menyebabkan keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan program dan aktivitas pembangunan. Keadaan ini sering menghambat koordinasi perencanaan pembangunan di lapangan, termasuk pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, seperti planning yang belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik, ketidaksesuaian perencanaan pembangunan dengan fungsi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, kurangnya

konsistensi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan, serta kekurangan dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten (Renstra BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023). Permasalahan dan tantangan inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti masalah yang terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin meneliti proses koordinasi dan komunikasi publik dalam pembangunan daerah di Sulawesi tenggara yang di lakukan BAPPEDA Sulawesi Tenggara dalam Langkah menuju masyarakat yang lebih baik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi terkait koordinasi dan komunikasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bagaimana koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dilakukan, serta untuk memahami sejauh mana komunikasi tersebut berkontribusi pada efektivitas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA. Jenis penelitian deskriptif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti tanpa bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat inferensi kausal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, yaitu Kepala Bidang Perencanaan Makro, Staf Bidang Perencanaan Makro, dan Staf Bidang Perencanaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan laporan yang berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai perencanaan pembangunan di provinsi tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses koordinasi dan komunikasi yang terjadi di BAPPEDA, sementara wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses tersebut.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan dari berbagai dokumen resmi dan laporan yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dianalisis, sementara penyajian data dilakukan dengan mengorganisir data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik yang menggambarkan hasil penelitian secara jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah dianalisis dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak dengan cara melakukan koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Koordinasi vertikal mengacu pada hubungan antara tingkatan yang berbeda dalam struktur organisasi, sedangkan koordinasi horizontal melibatkan hubungan antara unit atau departemen yang memiliki tingkat hierarki yang sama. Koordinasi diagonal, yang juga dikenal dengan koordinasi silang, melibatkan hubungan antara unit yang berada pada tingkatan berbeda dalam struktur organisasi, namun tidak langsung berhubungan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh BAPPEDA, termasuk dalam hal transmisi pesan, konsistensi komunikasi, dan kejelasan pesan yang disampaikan kepada berbagai pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika koordinasi dan komunikasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah, yang sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi publik dapat dijelaskan sebagai tindakan dan strategi komunikasi yang ditargetkan kepada audiens tertentu. Tujuan dari komunikasi publik ini melibatkan penyediaan informasi kepada audiens sasaran dan usaha meningkatkan pemahaman serta memengaruhi sikap atau perilaku mereka. Secara umum, Edwards III menguraikan tiga aspek utama dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pertama, dalam aspek transmisi, pelaksana kebijakan harus memahami dengan jelas tugas yang harus mereka jalankan. Keputusan dan instruksi kebijakan harus disampaikan kepada

pihak yang tepat sebelum dapat diterapkan. Oleh karena itu, komunikasi harus akurat dan mudah dipahami oleh pelaksana. Kedua, konsistensi dalam implementasi kebijakan sangat penting agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Instruksi yang diberikan harus tetap selaras dan tidak bertentangan. Ketiga, kejelasan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Arahan yang diberikan kepada pelaksana tidak hanya harus sampai kepada mereka, tetapi juga harus disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya (Ramadani, 2019).

A. Transmisi

Dalam aspek transmisi, para pelaksana kebijakan harus memahami tugas yang harus mereka laksanakan, sehingga keputusan dan perintah kebijakan harus disampaikan kepada pihak yang tepat sebelum dapat diikuti (Ramadani, 2019b). Transmisi komunikasi yaitu bagaimana proses pengiriman pesan atau informasi dari satu pihak (pengirim) ke pihak lain (penerima) melalui berbagai saluran atau media komunikasi. Proses transmisi komunikasi ini merupakan fondasi dari hampir setiap bentuk komunikasi manusia, mulai dari percakapan sehari-hari hingga komunikasi melalui media sosial, surat elektronik, dan bahkan komunikasi melalui media massa. Memahami elemen-elemen ini dan bagaimana mereka berinteraksi dapat membantu memastikan bahwa pesan atau informasi dapat disampaikan dan dipahami dengan efektif. Informasi yang disampaikan dapat berbentuk simbol, kata-kata, gambar, ilustrasi, grafik, dan berbagai bentuk representasi lainnya (Syarifuddin, 2022). Proses komunikasi dalam hubungan masyarakat berperan sebagai transmisi informasi, di mana seorang penyampai pesan (transmitter) harus mampu memilih dan memanfaatkan saluran serta media komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi secara efektif. Fokus utama dalam proses komunikasi humas terletak pada ketepatan (akurasi) dan efisiensi dalam penyampaian pesan, sehingga informasi dapat diterima, dipahami, dan diinterpretasikan dengan benar oleh audiens yang dituju. Penggunaan media yang sesuai, baik konvensional maupun digital, serta strategi komunikasi yang tepat, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan komunikasi (Putra et al., 2024).

Berdasarkan wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi kebijakan, khususnya pada indikator transmisi, Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara memanfaatkan media komunikasi digital, terutama WhatsApp, sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Komunikasi melalui WhatsApp digunakan dalam berbagai aspek perencanaan, termasuk proses pengiriman pesan, permintaan data, hingga penyampaian

dokumen perencanaan dan pelaporan. Penggunaan grup WhatsApp memungkinkan koordinasi yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel, karena informasi dapat langsung diterima dan ditanggapi oleh pihak terkait tanpa memerlukan pertemuan tatap muka yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan.

Selain itu, penggunaan WhatsApp juga mencerminkan upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam administrasi pemerintahan. Dengan kemudahan akses dan efektivitasnya, media ini berperan dalam memperlancar komunikasi lintas sektor, mempercepat respons terhadap kebutuhan perencanaan, serta memastikan bahwa kebijakan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti. Lebih lanjut, pemanfaatan WhatsApp dalam komunikasi kebijakan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Dengan adanya rekam jejak komunikasi yang terdokumentasi dalam grup, setiap informasi yang dikirimkan dapat ditinjau kembali untuk memastikan keakuratan dan konsistensi kebijakan yang diterapkan. Selain itu, komunikasi melalui media ini memungkinkan koordinasi lebih inklusif, di mana berbagai OPD dapat secara bersamaan mengakses informasi yang sama, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi dalam proses transmisi kebijakan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antara Bappeda dan OPD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, penggunaan media komunikasi digital ini juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Varanida, 2023) bahwa aktivitas pariwisata memerlukan komunikasi yang efektif secara komprehensif dalam merumuskan kebijakan guna mendukung sektor pariwisata di Kota Singkawang. Hal ini mencakup aspek transmisi terutama melalui media sosial, dalam menyampaikan kebijakan yang mendukung perkembangan pariwisata. Penelitian (Allifiyah, R.A dan Prastyawan, 2023) menunjukkan bahwa transmisi dalam komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik, karena terdapat proses sosialisasi yang dilakukan antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan sebelum penerapan kebijakan baru terkait pengaduan masyarakat. Sosialisasi ini telah dilakukan sekitar tujuh kali oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Selain itu, dinas tersebut juga menciptakan inovasi melalui penerapan e-government yang memfasilitasi masyarakat Kota Surabaya dalam menyampaikan pengaduan secara lebih efektif dan efisien.

B. Konsistensi

Konsistensi berarti informasi konsisten, selaras, antara satu pesan dengan pesan lainnya. Konsistensi komunikasi artinya, pesan-pesan yang disampaikan harus sesuai dan tidak saling bertentangan, sehingga menciptakan persepsi yang stabil dan dapat dipercaya bagi penerima pesan. Konsistensi dalam komunikasi di setiap interaksi dengan pelanggan sangat penting, karena hal ini memungkinkan peralihan dari sekadar transaksi menjadi hubungan yang lebih potensial dan berkelanjutan (Šerić et al., 2020). Dalam literatur akademis, konsistensi pesan dianggap sebagai elemen fundamental dalam mencapai tujuan komunikasi terpadu, karena konsistensi ini memastikan pesan yang disampaikan tetap jelas, koheren, dan efektif di seluruh saluran komunikasi (Castañeda-García et al., 2020).

Dalam konteks ini, konsistensi berarti bahwa Bappeda Prov. Sultra harus memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan tidak mengandung kontradiksi atau perbedaan signifikan di antara pesan-pesan yang berbeda. Hal ini menciptakan kepercayaan dan keyakinan pada OPD sebagai penerima bahwa pengirim konsisten dalam apa yang mereka sampaikan. Ketika pesan-pesan tetap konsisten, penerima lebih mungkin untuk memahami dan menerima informasi dengan baik, dan komunikasi menjadi lebih efektif karena persepsi yang stabil dibangun, yang pada gilirannya dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan mendukung pemahaman yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menekankan pentingnya konsistensi komunikasi dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konsistensi ini berperan krusial dalam memastikan bahwa setiap informasi yang dikirimkan sesuai dengan arahan dan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Komunikasi yang dilakukan Bappeda dengan OPD berlangsung secara berkelanjutan, terutama pada awal dan akhir tahun, untuk memastikan keselarasan informasi yang disampaikan. Setiap pesan yang dikirim, baik oleh kepala bidang maupun fungsional perencanaan, harus sesuai dengan arahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan informasi dan memastikan bahwa OPD menerima instruksi yang tepat dalam menyusun rencana kerja dan kebijakan pembangunan. Selain itu, komunikasi yang konsisten juga berkontribusi dalam menciptakan koordinasi yang lebih efektif antarinstansi, mengurangi risiko miskomunikasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya keselarasan dalam penyampaian pesan, setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang seragam mengenai tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai contoh, dimulai dengan penelitian (Festinger & Carlsmith, 1959) berbagai studi masih menunjukkan bahwa ketika perilaku seseorang tidak sesuai dengan sikap atau keyakinannya, individu akan berusaha mengurangi ketidakkonsistenan tersebut dengan mengubah sikapnya. Hal ini dilakukan agar sikap yang dimilikinya menjadi lebih konsisten dengan perilaku yang tampak tidak sesuai sebelumnya (Mojzisch et al., 2014).

Konsistensi komunikasi juga berdampak pada peningkatan transparansi dalam perencanaan kebijakan, karena setiap informasi yang dikirimkan dapat ditelusuri dan dipastikan akurasi sebelum diterapkan dalam kebijakan daerah. Lebih jauh, penerapan komunikasi yang konsisten tidak hanya memperkuat hubungan antara Bappeda dan OPD tetapi juga membantu dalam membangun budaya kerja yang lebih profesional dan terorganisir. Dengan komunikasi yang terstruktur, Bappeda dapat lebih mudah mengelola data, memantau perkembangan kebijakan, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas dan konsisten juga memudahkan dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, karena informasi terdokumentasi dengan baik dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa menjaga konsistensi dalam komunikasi merupakan aspek penting dalam koordinasi antara Bappeda dan OPD. Dengan menerapkan prinsip ini, proses perencanaan dan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang telah dirancang. Selain itu, komunikasi yang konsisten dapat meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat transparansi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan memiliki landasan informasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian (Saputro et al., 2023) memberikan kontribusi terhadap optimalisasi komunikasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penerapan strategi yang efektif dan inovatif dalam mengelola informasi dan meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, hasil penelitian (Allifiyah, R.A dan Prastyawan, 2023) juga menunjukkan bahwa aspek konsistensi dalam komunikasi kebijakan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan perumus kebijakan, khususnya Kepala Dinas, dalam melakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan. Ketidakkonsistenan tersebut terjadi karena Kepala Dinas terlalu sibuk dengan

tugas dan pekerjaan lain di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, sehingga sosialisasi kebijakan tidak dilakukan secara berkelanjutan dan optimal.

C. Kejelasan Pesan

Kejelasan pesan adalah bagaimana Pesan yang jelas memberikan informasi yang tepat, tidak ambigu, dan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Ketika kita berkomunikasi, kejelasan pesan menjadi aspek krusial karena pesan tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan komunikasi. Kejelasan pesan mencakup keselarasan antara maksud yang ingin disampaikan dengan interpretasi yang dimengerti oleh penerima pesan. Untuk memastikan agar pesan dapat dipahami dengan baik, penting untuk menghindari kesalahan tata bahasa yang dapat merusak makna suatu kata. Kejelasan pesan perlu ada dalam setiap alur komunikasi, baik itu dari atasan ke bawahan, sebaliknya, maupun dalam komunikasi dengan pihak luar (eksternal). Kejelasan pesan juga berperan sebagai indikator kualitas komunikasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasional.

Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai organisasi yang terus melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tolok ukur dalam penyampaian pesan guna memastikan efektivitas komunikasi. Tolok ukur ini mencakup tiga aspek utama: pesan harus bersifat umum sehingga dapat dipahami oleh banyak pihak, tidak bertele-tele agar tetap jelas dan memiliki tujuan yang spesifik, serta sesuai dengan kebutuhan sehingga informasi yang disampaikan relevan dengan tugas dan fungsi OPD. Dalam praktiknya, OPD menerima pesan dari Bappeda dengan kejelasan yang baik, mencakup berbagai hal seperti permintaan data untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun pelaporan akhir kegiatan. Kejelasan pesan ini menjadi faktor penting dalam memastikan komunikasi yang efektif dan efisien antara Bappeda dan OPD dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pentingnya kejelasan pesan dalam komunikasi ini sejalan dengan pendapat Fatimah (2022), yang menyatakan bahwa pesan yang jelas harus mampu memberikan informasi yang tepat, tidak ambigu, dan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Kejelasan pesan ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap informasi yang dikirimkan oleh Bappeda kepada OPD dapat dipahami dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan. Lebih lanjut, kejelasan pesan juga berkontribusi terhadap efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya komunikasi yang jelas, OPD dapat merespons permintaan data atau informasi dengan lebih cepat dan akurat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan

daerah secara lebih efisien. Selain itu, pesan yang tidak ambigu dan sesuai kebutuhan juga membantu dalam membangun hubungan kerja yang lebih harmonis antara Bappeda dan OPD, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur, serta meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan pesan dalam komunikasi kebijakan yang diterapkan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan sangat baik. Dengan mengutamakan kejelasan dalam setiap pesan yang dikirimkan, koordinasi antara Bappeda dan OPD dapat berjalan lebih efektif, mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih terarah, serta memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dapat langsung diterapkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Allifiyah, R.A dan Prastyawan, 2023) menunjukkan bahwa aspek kejelasan dalam komunikasi kebijakan telah terpenuhi dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui sosialisasi perumusan implementasi kebijakan yang melibatkan Kepala Dinas, Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-gov), serta Pelayanan Pengaduan. Sosialisasi mengenai penerapan Aplikasi Pengaduan WargaKu Surabaya dilakukan dengan arahan yang jelas serta penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga para pelaksana kebijakan dapat memahami dan menjalankan kebijakan tersebut secara efektif

KESIMPULAN

Komunikasi publik yang efektif memainkan peran penting dalam penyampaian kebijakan yang jelas dan konsisten. Berdasarkan penelitian ini, tiga aspek utama dalam proses komunikasi kebijakan—yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan pesan—terbukti sangat mempengaruhi efektivitas koordinasi antara Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemanfaatan media digital seperti WhatsApp dalam transmisi informasi memungkinkan komunikasi yang cepat, efisien, dan transparan, sementara konsistensi komunikasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap selaras dan dapat dipercaya. Kejelasan pesan menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa informasi yang diterima OPD tepat dan mudah dipahami, sehingga mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif dan terarah.

Dengan komunikasi yang jelas, konsisten, dan menggunakan saluran yang tepat, proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih lancar, meminimalkan miskomunikasi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengambilan

keputusan pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menciptakan proses administrasi yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Lebih jauh lagi, penggunaan komunikasi yang efektif ini juga memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan komunikasi kebijakan ini tidak hanya memperlancar jalannya perencanaan pembangunan, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang lebih profesional, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan daerah. Di sisi lain, komunikasi kebijakan yang terbuka dan transparan juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lain yang terkait. Hal ini membuka ruang untuk dialog yang konstruktif dan kolaborasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan penerapan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, seperti kejelasan, konsistensi, dan pemilihan saluran yang tepat, informasi dapat dengan mudah disampaikan kepada masyarakat luas. Ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa lebih dilibatkan dalam setiap tahap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, komunikasi yang baik akan memastikan bahwa masyarakat memahami kebijakan yang sedang dijalankan, sehingga mereka dapat memberikan dukungan atau umpan balik yang berguna untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, baik internal maupun eksternal, memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Implementasi komunikasi yang baik akan meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan, mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang ada berjalan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Allifiyah, R.A dan Prastyawan, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi WargaKu Surabaya (Studi Kasus: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya), Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 1(3), 574–586.
- Anouar, E. M., Khadija, N., & Gomes, J. S. (2024). Regional territorial planning in Morocco : case of regional development plan , between legal provisions and realities of

- implementation. *Conference: IIAS-KSG Mombasa Conference 2024, "International Collaborative Governance" At: Kenyan School of Government, Mombasa Kenya, March.* https://www.researchgate.net/publication/378684115_Regional_territorial_planning_in_Morocco_case_of_regional_development_plan_between_legal_provisions_and_realities_of_implementation
- Aryal, B., Poudel, B., Karki, J., & Bhandari, S. (2024). Expectation of the Communication Mechanism and its Gap in Public Administration: Approaches to Communication between Local Government and Public. *Nepal Journal of Multidisciplinary Research*, 7(2), 109–126. <https://doi.org/10.3126/njmr.v7i2.68251>
- Castañeda-García, J. A., Frías-Jamilena, D. M., Del Barrio-García, S., & Rodríguez-Molina, M. A. (2020). The Effect of Message Consistency and Destination-Positioning Brand Strategy Type on Consumer-Based Destination Brand Equity. *Journal of Travel Research*, 59(8), 1447–1463. <https://doi.org/10.1177/0047287519881506>
- Demaisi, S., Kawuryan, M. W., & Eviany, E. (2024). Government Communication Management in Handling Public Complaints Within the CRM Program at the Department of Communication Informatics and Statistics of DKI Jakarta Province. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 1184–1195. <https://www.researchgate.net/publication/384973005%0AGovernment>
- Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 58(2), 203–210. <https://doi.org/10.1037/h0041593>
- Hanani, S. (2017). Strategi Komunikasi Public Relations. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(02), 212.
- Ibrahim, O. R. (2017). Issues in regional planning and development in nigeria. *Часопис Соціально-Економічної Географії*, 22(1). <https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-22-13>
- Indah, N. S., Rachman, E., & Gobel, L. Van. (2024). Digitalized Regional Development Planning Model for North Gorontalo Regency: A Technology-Enhanced Approach to Participatory and Technocratic Planning. *Journal of Scientific Insights*, 1(3), 131–142. <https://doi.org/10.69930/jsi.v1i3.199>
- Kumalasari, A., Musa, H. G., Garad, A., Emovwodo, S. O., & Aditasari, K. (2024). How Digital Communication Transparency and Public Trust Shape Crisis Communication through Public Engagement. *Komunikator*, 16(2), 182–195. <https://doi.org/10.18196/jkm.24485>
- Mojzisch, A., Kerschreiter, R., Faulmüller, N., Vogelgesang, F., & Schulz-Hardt, S. (2014). The consistency principle in interpersonal communication: Consequences of preference confirmation and disconfirmation in collective decision making. *Journal of Personality and Social Psychology*, 106(6), 961–977. <https://doi.org/10.1037/a0036338>
- Mucharam, A. (2022). Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 71–82.
- Nasution, M. A., Ginting, W. O., Revida, E., & Trimurni, F. (2025). Evaluation Model of Sustainable Development Planning in Regional Policy Implementation and Local

- Government Administration. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 1595–1609. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5976>
- Putra, I. P. G. U. U., Jelantik, S. K., & Andyana, I. B. D. (2024). Komunikasi Efektif Public relations Dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Prima (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. *Samvada. Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relations*, 3(1), 15–28.
- Ramadani, T. (2019a). Pengelolaan Komunikasi Publik. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 11–27. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.42>
- Ramadani, T. (2019b). The Implementation of Public Communication Management Policy at Ministry of Energy and Mineral Resources. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369>
- Saputro, E., Hartini, S., Hendro, F., Putro, A., Prajoko, R., Nyoman, N., & Dewi, C. (2023). Communication Strategy of Management Karysma FM Radio in Maintaining Consistency and Existence in The Digital Era. *Kinesik*, 10(2), 173–192. <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.873>
- Šerić, M., Ozretić-Došen, Đ., & Škare, V. (2020). How can perceived consistency in marketing communications influence customer–brand relationship outcomes? *European Management Journal*, 38(2), 335–343. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.08.011>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 16.
- Syarifuddin, D. R. (2022). JASIMA: JURNAL KOMUNIKASI KORPORASI DAN MEDIA Pola Komunikasi Publik di Era Digital Public Communication Patterns in the Digital Era. *Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media*, 3(2), 173–174.
- Varanida, D. (2023). KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SINGKAWANG. *Responsive*, 5(4), 255. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.44441>